

## Disdikbud Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Gratis Tahun Ini Lebih Cepat



*Sumber Gambar: KALTIM POST Rabu, 07/01/2026*

**KALTIMPOST.ID, BONTANG** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang memastikan seluruh program perlengkapan sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ini tanpa pengurangan anggaran. Evaluasi pengadaan dilakukan agar pendistribusian seragam, buku tulis, tas, dan sepatu dapat dilakukan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, mengatakan seluruh program unggulan di sektor pendidikan yang telah dicanangkan Wali Kota Bontang tetap menjadi prioritas utama. Ia memastikan tidak ada pemangkasan nilai anggaran untuk program tersebut. Termasuk sasaran penerimanya. “Semua program-program unggulan Ibu Wali Kota tetap kita programkan. Tidak ada pengurangan nilai dari program itu,” kata Abdu Safa Muha.

Ia menyebutkan, salah satu program yang terus dilanjutkan adalah pengadaan buku tulis gratis bagi peserta didik. Bahkan, sebagian buku tulis telah mulai dibagikan kepada siswa. Untuk tahun ini, pengadaan buku tulis kembali dianggarkan sebagai bagian dari upaya meringankan beban orang tua siswa. “Kalau tidak salah kemarin buku tulis sudah dibagikan. Tahun ini tetap kita anggar,” ucapnya.

Terkait keterlambatan pengadaan buku tulis yang sempat terjadi pada tahun sebelumnya, Safa mengakui hal tersebut menjadi bahan evaluasi serius. Menurutnya, keterlambatan itu disebabkan oleh beberapa kendala administratif, salah satunya kesalahan nomenklatur dalam proses penganggaran. “Memang kemarin pengadaan seragam agak terlambat. Itu menjadi evaluasi kami,” ungkapnya. Sebagai langkah perbaikan, Disdikbud Bontang akan melakukan proses pengadaan lebih awal pada tahun ini. Tujuannya agar seluruh

perlengkapan sekolah, termasuk seragam dan buku tulis, sudah bisa diterima siswa tepat saat memasuki tahun ajaran baru.

“Tahun ini kita lakukan lebih awal pengadaannya. Harapannya, saat masuk tahun ajaran baru, anak-anak sudah bisa menikmati seragam dan perlengkapan sekolah,” jelasnya. Safa optimistis dengan perencanaan yang lebih matang dan perbaikan administrasi, kendala yang terjadi sebelumnya tidak akan terulang. Ia berharap proses pengadaan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. “Mudah-mudahan tahun ini tidak ada kendala. Kemarin itu terbentur kesalahan nomenklatur, sekarang sudah kita perbaiki,” terangnya.

Diketahui, khusus sepatu untuk jenjang SD dikucurkan Rp4,6 miliar dan SMP Rp2,2 miliar. Sementara untuk tas sekolah untuk jenjang SD diplotkan anggaran senilai Rp3,4 miliar dan SMP Rp1,6 miliar. Pemkot Bontang menganggarkan untuk seragam sekolah gratis mencapai Rp10,8 miliar, dengan rincian untuk Rp7 miliar untuk SD dan Rp3,8 miliar untuk SMP.

Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), anggaran pengadaan buku tulis untuk jenjang SD mencapai Rp1,2 miliar, sedangkan untuk SMP sebesar Rp592 juta. (\*)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Disdikbud Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Sekolah Gratis Tahun Ini Lebih Cepat, 07/01/2026

**Catatan:**

1. Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
3. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang mengatur bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah pendidikan.

4. Pasal 52 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas pendidikan.